



**DESENTRALISASI DAERAH DI PALEMBANG
TAHUN 1948 – 1957**

DISUSUN OLEH

**Nama : Fera Yuliana Dewi
N P M : 6704040055**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2007**

ABSTRAK

Fera Yuliana Dewi, **Pemerintahan Daerah di Sumatera Selatan pada tahun 1948-1957**. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Susanto Zuhdi dan Dr. Priyanto. Program Studi Ilmu Sejarah, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemerintahan daerah di Sumatera Selatan yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1957. Pemerintahan daerah merupakan bagian dari administrasi kenegaraan. Sebagai bagian dari administrasi negara Indonesia maka terdapat sistem desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Dalam rentang waktu sejak Negara Indonesia merdeka hingga tahun 1957 telah dikeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai pembagian wewenang kepada daerah dan berkaitan dengan pemerintahan di daerah, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1945, Undang-undang No.22 tahun 1948 dan Undang-undang No.1 tahun 1957. masing-masing Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-undang yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan di daerahnya. Pemberian desentralisasi tersebut bertujuan agar pemerintah daerah mampu mengelola kekayaan sumber daya yang terdapat didaerahnya secara maksimal dan demi kepentingan pembangunan di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi di Indonesia telah berlangsung lama. Pengenalan sistem desentralisasi dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di daerah Pulau Jawa melalui *Desentralisasi Wet* 1903. Kebijakan desentralisasi sangat penting untuk dilaksanakan agar tidak terjadi ketidakadilan yang menciptakan jurang pemisah yang luas antara daerah dan pusat, dan bisa memberikan rasa aman sehingga tidak menciptakan bahaya disintegrasi di dalam keamanan nasional. Setiap undang-undang tersebut memiliki perbedaan dalam substansi, isi dan latar belakang peristiwa yang menyebabkan diberlakukannya undang-undang tersebut. Meskipun memiliki perbedaan substansi isi namun Pemerintah Pusat telah melakukan usaha untuk memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan kondisi yang berlaku di daerah masing-masing.

undang-undang tersebut memiliki tujuan yang baik untuk mengatur pemerintahan di daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat persoalan yang timbul dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga timbul berbagai protes melalui sebuah gerakan yang mewakili kekecewaan daerah terhadap pusat. Secara umum, di Sumatera protes terhadap Pemerintahan Pusat diawali oleh kelompok militer yang membentuk dewan-dewan yang berasal dari kesatuan militer, seperti Dewan Gajah, Dewan Banteng, Dewan Garuda. Di Sumatera Selatan timbul Dewan Garuda, sama halnya dengan Dewan Banteng dan Dewan Gajah yang memiliki keinginan agar Pemerintah Pusat tidak hanya memperhatikan kepentingan pembangunan di Pulau Jawa saja, melainkan juga daerah-daerah di luar Jawa. Karena wilayah Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam yang kaya dan telah memberikan sumbangan yang besar terhadap kas negara. Namun kondisi pembangunan di wilayahnya tertinggal jauh. Hal ini lah yang menjadi tuntutan dari daerah kepada Pemerintah Pusat.

LEMBARAN PENGESAHAN

Tesis ini telah diujikan pada hari selasa, tanggal 8 Januari 2008, pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00, dengan susunan tim penguji sebagai berikut :

1. Prof. Dr. I Ketut Surajaya
Ketua Tim Penguji
2. Prof. Dr. Susanto Zuhdi
Pembimbing
3. Dr. Priyanto Wibowo
Pembaca/Penguji
4. Dr. Djoko Marihandono
Penguji
5. Dr. Suharto
Penguji

Disahkan oleh :

Ketua Departemen Sejarah
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dekan Program Pasca Sarjana
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Priyanto Wibowo

N.I.P.

Prof. Dr. Ida Sundari Husen

N.I.P.

LEMBAR PERNYATAAN

Seluruh isi tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Depok, Januari 2008
Penulis

Fera Yuliana Dewi
NPM. 6704040055



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Berbagai hambatan, halangan, rasa jenuh, sedih maupun keengganan untuk menuntaskan tesis ini penulis alami. Sejak pertama kali menulis, hambatan menemukan sumber, memahaminya, hingga menginterpretasikannya penulis alami. Namun, dengan hadirnya karya akhir yang berupa tesis ini membuktikan bahwa semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan tesis ini tidak akan selesai, bahkan tidak akan pernah selesai apabila tidak dibantu oleh beberapa pihak. Sudah sepantasnya dan selayaknya penulis ucapkan banyak terima kasih, antara lain:

Pertama, kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia, baik Rektor yang lama maupun Rektor yang baru, penulis ucapkan terima kasih karena penulis telah diberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmu di Program Studi Sejarah, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia;

Ucapan terima kasih *kedua*, penulis sampaikan kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam ilmu di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Iklim belajar yang menyenangkan, fasilitas belajar yang nyaman, serta karyawan yang bersahabat, sungguh

membuat penulis menjadi nyaman dan kerasan menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.

Ketiga, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ketua Departemen Sejarah yang lama Prof. Dr. I Ketut Surajaya, dan Ketua Departemen yang baru Dr. Priyanto Wibowo, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sejak penulis mulai belajar di Program Studi Sejarah. Hari demi hari pada masa perkuliahan penulis alami. Suka dan duka penulis jalani untuk menuntut ilmu di Program Studi Sejarah Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Perjalanan waktu yang demikian panjang, seakan sirna setelah tesis ini selesai. Untuk semuanya itu, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan arahan yang diberikan selama ini.

Penulisan tesis yang sangat ketat dalam kaidah penulisannya, substansinya, maupun penyajiannya seperti terlihat pada bentuk yang ada seperti ini, tidak terlepas dari torehan pemikiran para pembimbing. Untuk semuanya itu, penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Prof. Dr. Susanto Zuhdi yang telah membimbing, memberikan arahan, menunjukkan jalan keluar apabila penulis memperoleh kesulitan. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Dr. Djoko Marihandono yang telah bersedia menjadi pembaca tesis ini. Kepada penguji Dr. Suharto, dan para penguji lainnya, penulis ucapkan banyak terima kasih atas saran dan komentarnya.

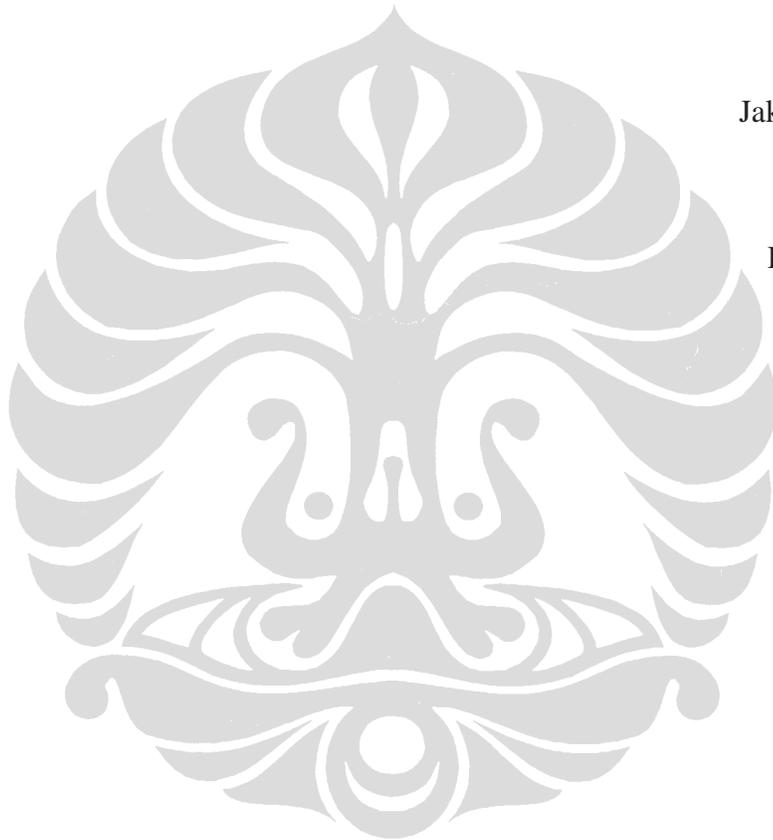
Kepada teman-teman seangkatan, mbak Dewi, mbak Nanik, Mas Harto, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, dukungan, dan dorongan semangat yang teman-teman berikan, membuat penulis menjadi bersemangat kembali menulis apabila rasa jenuh dan bosan tiba.

Terakhir, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada ayah, ibu, serta saudaraku, Nova, Boga, dan Bayu yang selalu mengharapkan penulis menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Di akhir kata penulis merasakan masih banyaknya kekurangan. Kritik dan saran membangun terhadap penulisan tesis ini masih penulis nantikan, khususnya untuk perbaikan tesis ini di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2007

Penulis

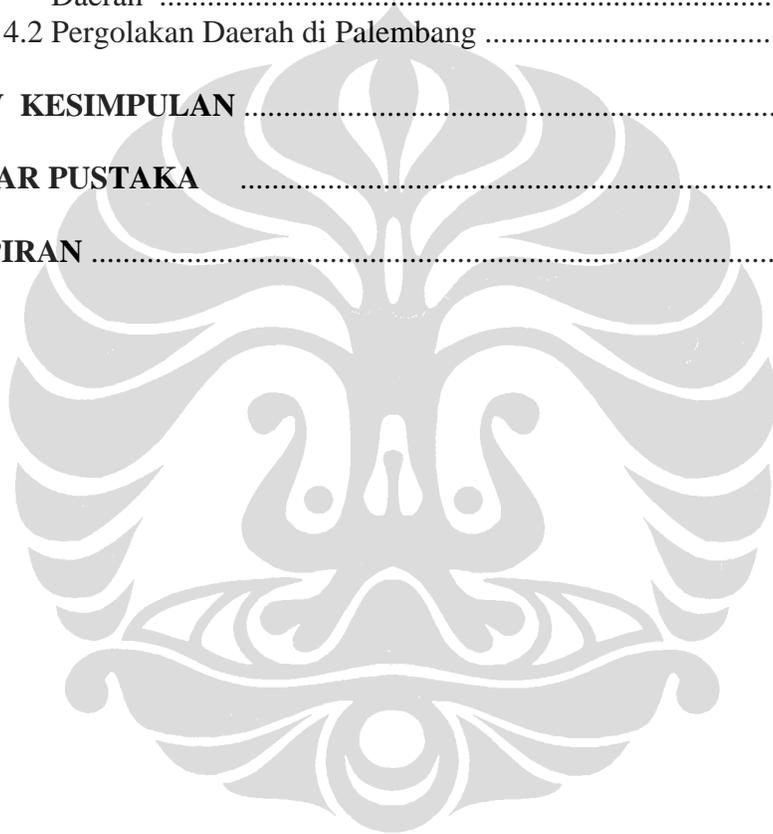
Fera Yuliana Dewi



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SKEMA	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Periode Kesultanan Palembang	4
1.1.3 Periode Pemerintahan Kolonial Belanda	6
1.1.4 Periode Pemerintahan Militer Jepang	9
1.2. Permasalahan	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Ruang Lingkup	14
1.5. Metode Penelitian dan Sumber Penelitian	15
1.6. Kerangka Teori	17
1.7. Sistematika Penulisan	25
BAB II AWAL PENERAPAN DESENTRALISASI	26
2.1. Sistem Pemerintahan Daerah di Palembang Pascarevolusi antara Tahun 1945 dan 1948	28
2.2. Aspirasi Lokal dalam Pemerintahan Daerah di Palembang.	42
2.3. Peranan Militer Dalam Pemerintahan di Palembang.	50
2.4. Kemunculan Undang-undang Desentralisasi Tahun 1948.....	52

BAB III DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DI PALEMBANG	
1948 – 1957	60
3.1 Bentuk dan Susunan Pemerintahan di daerah Palembang 1945—1948	69
3.2 Pembagian Wewenang Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah	78
3.3 Sistem Pemerintahan Belanda di Palembang	87
BAB IV HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	94
4.1 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	99
4.2 Pergolakan Daerah di Palembang	103
BAB V KESIMPULAN	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	119



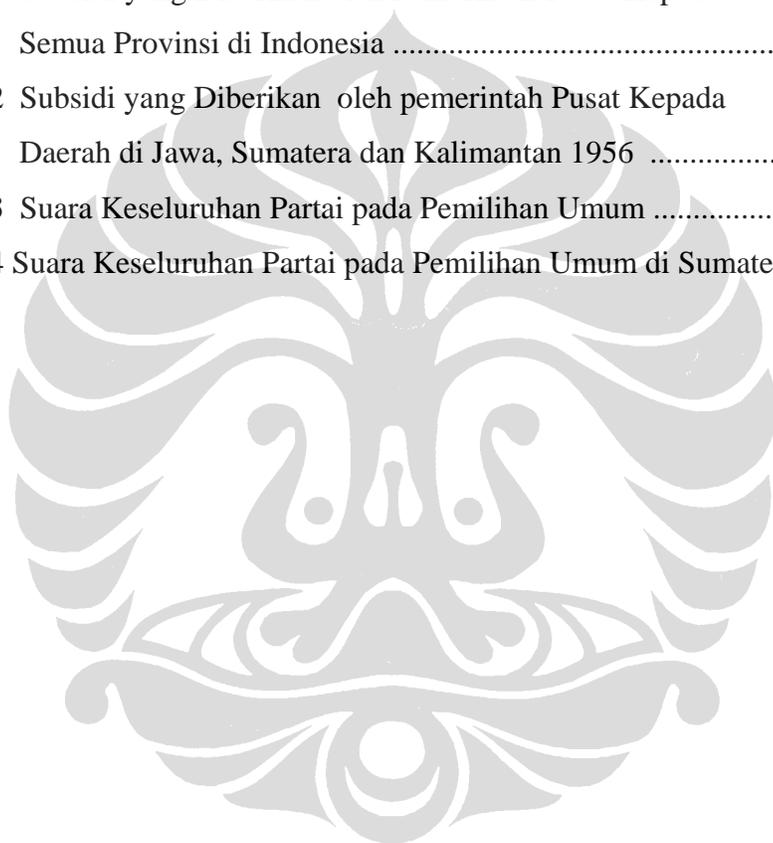


DAFTAR SKEMA

1. Skema 1 Pembagian Wilayah Palembang tahun 1942-1945.....	33
2. Skema 2 Pembagian Wilayah Di Pulau Sumatera 1946	35
3. Skema 3 Struktur Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1945.	52
4. Skema 4 Struktur Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1948.	57
5. Skema 5 Struktur Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1957.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Subsidi yang Diberikan oleh Pemerintah Pusat Kepada Semua Provinsi di Indonesia	99
Tabel 2 Subsidi yang Diberikan oleh pemerintah Pusat Kepada Daerah di Jawa, Sumatera dan Kalimantan 1956	100
Tabel 3 Suara Keseluruhan Partai pada Pemilihan Umum	105
Tabel 4 Suara Keseluruhan Partai pada Pemilihan Umum di Sumatera Selatan ..	106



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nama *Palembang* berasal dari kata [*limbang*] dan mendapatkan prefiks [*pe*] yang berarti ‘melimbang’ atau ‘mencuci’ (emas) dengan cara mengayak dalam nyiru. Dengan demikian kata *Palembang* berarti ‘tempat untuk membersihkan emas’ atau ‘intan’. Palembang menjadi tempat mencuci logam berharga, yang menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal raja-raja dari zaman Hindu sampai pada masa Kerajaan Islam.¹ Para raja itulah yang memerintahkan agar para pencuci emas dan intan membawa hasil yang diperolehnya ke pusat kerajaan. Raja memerintahkan demikian untuk menghindarkan diri dari pencurian logam mulia dan memudahkan pengawasannya dalam proses pembersihan logam mulia itu.²

Pendapat lain mengatakan bahwa kata *Palembang* berasal dari kata [*lembang*] yang berarti ‘air merembes’ atau ‘rembesan air’. Sementara prefiks [*pe*] menunjukkan keadaan atau tempat.³ Dalam suatu kisah dikatakan bahwa Kerajaan Majapahit mengirimkan utusan untuk mendirikan sebuah daerah koloni di di pesisir timur Sumatera. Kapal utusan tersebut mengalami kecelakaan dan karam di dekat mulut sungai Musi, sehingga semua barang bawaan kapal itu ikut tenggelam. Hanya sebuah peti saja yang masih dapat diselamatkan, walaupun sudah dalam keadaan pecah. Peti itu ternyata berisi kelapa. Potongan peti itu dijadikan rakit oleh penumpang yang selamat. Mereka yang selamat itu adalah empat bersaudara, masing-masing peti dimuati oleh dua orang. Kepingan peti itu mereka tumpangi, dan mereka terombang ambing (*limbang-limbang*) di

¹ Achadiati Ikram (Ed.). *Jati Diri yang Terlupakan: Naskah-naskah Palembang*. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara (Yanasa) 2004:2)

² JL Van Sevenhoven. *Lukisan tentang Ibukota Palembang*. Jakarta: Bharata. 1971: 12)

³ Djohan Hanafiah. *Melayu-Jawa Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995:15.